

Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024

Taufik Hidayat¹, Miftahul Hidayah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

taufikasciaz@gmail.com

mbidayah231@gmail.com

Artikel History

Submit: 03 September 2023

Review: 16 November 2023

Revised: 29 November 2023

Accepted: 19 December 2023

Abstract: This study aims to determine the phenomenon of identity politics in Indonesia, farming Islamic identity politics and identity politics ahead of the 2024 elections. The method used is qualitative. Data is grouped into primary and secondary, where primary data is obtained from books, and journals and secondary data from articles published on the internet. Data collection techniques by way of literature review. After that the data is collected, presented, and then drawn conclusions. The results of this study concluded identity politics is not just an Indonesian phenomenon, it has become a global phenomenon. Identity politics arises as a reaction or response to injustice. Indonesia has had its historical roots since the colonial period. It's just that identity politics can have a positive impact, it can also be negative. Solidarity and tolerance between groups are positive effects, while suspicion, conflict, and division are negative effects. However, this study argues that the use of Islamic identity politics in any form and dose will not harm the nation as long as it does not use means that are contrary to the constitution.

Keywords: Politics, Identity, Islam, Elections

How to cite: Taufik Hidayat dan Miftahul Hidayah. (2023). Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 190–213. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1163>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan momen bersejarah bagi kehidupan demokrasi sebuah negara bernama Indonesia. Pada saat itu, negara dengan mayoritas penduduknya umat Islam ini, akan menyelenggarakan tiga pemilihan sekaligus, pemilihan presiden (Pilpres) pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara bersamaan. Pemilu 2024 itu nantinya akan menjadi ruang bagi putra putri terbaik bangsa Indonesia untuk bertarung merebut mandat dari rakyat, sekaligus menjadi titik tolak bagi bangsa Indonesia dalam menentukan kemana arah perjalanannya selama lima tahun kedepan. Pada momentum sekali dalam lima tahun itu, 273,52 juta jiwa rakyat Indonesia akan menyerahkan mandatnya kepada mereka yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat sampai pemimpin daerah sesuai dengan amanat konstitusi. Seperti diketahui melalui peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, telah menetapkan tanggal 14 Februari sebagai hari Pemilu.

Sementara itu, politik identitas menjadi salah satu tema yang menjadi arus utama dalam ragam diskusi publik. Politik identitas sendiri, mengacu kepada praktik politik yang berdasarkan pada kelompok agama, etnis, denominasi sosial budaya yang kontras terhadap praktik politik yang berdasar pada kepentingan. Ini artinya, aliansi sebuah kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan, baik agama, budaya, dan etnis yang merasa tersingkir dari kelompok dominan dan berkuasa yang kemudian diterjemahkan dalam perjuangan politik. Persoalan terkait politik identitas ini menjadi semakin menarik atensi publik, apalagi media massa terlibat secara intens memuat artikel atau opini yang berkaitan tentangnya. Media Kompas misalnya menurunkan artikel diantaranya berjudul Tangkal Bahaya Politik Identitas dengan Dialog Lintas Iman dan Waspadai Politik Identitas Lewat Manipulasi Opini Jelang Pemilu 2024. Artikel pertama menyarankan pentingnya dialog lintas agama, untuk menangkal bahaya politik identitas apalagi menjelang pemilu 2024 (Kompas, 28/01/2023). Artikel kedua, menghimbau masyarakat agar mewaspadai manipulasi opini publik melalui politik identitas menjelang pemilu 2024. Dikatakan bahwa pola yang dilakukan biasanya dalam bentuk ujaran kebencian dan yang berdampak pada disharmoni dan kekerasan antar anak bangsa (Kompas, 02/3/2023). Secara tidak langsung media Kompas berperan dalam membentuk citra terhadap politik identitas.

Sementara itu, para ahli berbeda pendapat terkait politik identitas ini. Misalnya Ahmad Syafii Maarif melihat politik identitas dalam bentuk apapun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa, selama Pancasila sebagai dasar filosofis negara dihayati, dilkasankan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sedangkan Siti Musda Mulia, dalam konteks Indonesia politik identitas menurutnya sering dilakukan oleh kelompok agama mayoritas, dalam hal ini yaitu Islam. Sedangkan pada level simpul masyarakat atau civil society Islam, Haedar Nasir selaku Ketua Umum Muhammadiyah, mengkritik pihak yang melakukan dikotomi terhadap politik identitas. Seperti dikutip beritajatim.com, Haedar mengatakan, “Tidak (ber)politik identitas, tapi setiap tokoh dan kekuatan politik datang ke pesantren. Padahal itu politik identitas sebenarnya. Ingin merebut hati kaum santri. Jadi akhirnya apa? Politik demokrasi kita cenderung membelah.” Berbeda dengan Muhammadiyah, NU melalui ketua umumnya Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menghimbau agar warga NU itu tidak terlibat atau menghindari politik identitas dengan alasan demi menjaga reputasi bangsa. Mengutip dari NU Online Gus Yahya mengatakan, “Kita harus mulai dari Indonesia, karena Indonesia sudah memiliki reputasi sebagai bangsa yang menjadi teladan dunia terkait dengan toleransi, suku, etnik, maupun agama.”

Sedangkan dari partai politik, terdapat partai yang menegaskan dirinya untuk tetap menjalankan politik identitas. Misalnya Partai Ummat yang merupakan salah satu partai politik peserta pemilu 2024. Partai yang didirikan oleh Amien Rais itu, melalui ketua umumnya Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan menjalankan politik identitas dan melawan semua narasi yang menyesatkan berkaitan dengan politik identitas. Ridho mengatakan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Ia juga menegaskan memisahkan agama dengan politik adalah 'proyek sekularisme'. Pada saat yang sama, hampir sebagian besar partai politik menolak pemilu 2024 diwarnai oleh politik identitas. Diantara alasan umum yang disampaikan yaitu, karena dapat memicu perpecahan dan membahayakan kerukunan dan persatuan bangsa. Atas sejumlah fakta itu, penelitian ini mengangkat judul “Islam dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024.” Judul ini dipilih mengingat wacana politik identitas menjelang pemilu 2024 terus bergulir mewarnai ragam diskusi publik. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia diseret dalam dinamika wacana politik identitas itu. Mengingat untuk kepentingan elektoral, suara umat Islam sering menjadi sasaran bagi para kandidat atau politisi, baik yang beragama Islam, maupun yang

bukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik identitas di Indonesia, farming isu politik identitas Islam dan politik identitas menjelang pemilu 2024.

Politik identitas diartikan sebagai individu atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan tertentu dengan menjadikan identitas sebagai tameng dan digunakan dalam konstelasi politik untuk mempengaruhi aspirasi dan kebijakan publik. Identitas menurut KBBI adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri. Identitas disini, bisa agama, kepercayaan, budaya, sampai ideologi. Ia melekat pada diri seorang atau kelompok, pembeda terhadap yang di luarnya. Donald Horowitz (1985) sebagaimana dikutip oleh Alfridus mengatakan identitas merupakan faktor yang melekat pada diri masing-masing orang, sehingga berpengaruh terhadap preferensi pilihan politik. Kemudian Lasswell seperti dikutip oleh Syafuan mendefinisikan politik identitas sebagai strategi dan konstelasi ikatan simbol kultur, primordial (agama, suku, ras dan kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Masih dari sumber yang sama Agnes Heller memaknai politik identitas sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial, sebagai kategori utamanya. Misalnya saja dari segi etnis orang Jawa, orang Sunda, orang Aceh atau orang Papua, sedangkan dari segi agama seperti umat Islam, umat Katolik, Hindu Budha dan yang lainnya sebagai kategori identitas utama.

Sedangkan menurut Ahmad Syafii Maarif, secara substantif politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok yang merasa diperas dan tersingkir oleh sebuah arus besar dalam sebuah negara atau bangsa. Bisa dikatakan kelompok yang merasa tersingkir tadi itu, membentuk aliansi identitas tertentu, yang kemudian melalui aliansi itu mereka menyatukan kepentingannya untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap kelompok dominan dan mapan. Terutama dominan terhadap penguasaan sumber daya serta mapan secara ekonomi dan status sosial. Karena itu Cansu Elmadagli dan David Machin mengatakan politik identitas bisa menjadi gerakan sosial berbasis isu tunggal, yang diprakarsai oleh kelompok tertindas dan terpinggirkan dalam hal gender, seksualitas, ras, kemampuan, serta kategori identitas lainnya.

Secara sejarah, fenomena politik identitas pertama kali digunakan sekitar 1980-an dan 90-an tepatnya di Amerika Serikat, sebagai reaksi atau respon terhadap ketidakadilan berbasis identitas dan seksual. Tapi dalam perkembangan berikutnya, isu politik identitas meluas ke berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat di berbagai negara. Maarif menjelaskan dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas meluas meliputi

agama, kepercayaan dan ikatan-ikatan kultural yang beragam. Dalam konteks persaingan politik elektoral, politik identitas dikaitkan dengan penggunaan identitas tertentu sebagai kendaraan politik. Memang dalam berbagai temuan, faktor agama berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih. Dalam konteks politik lokal misalnya, faktor agama dan etnis menjadi bahan bakar bagi kemunculan politik identitas dalam setiap pemilihan kepala daerah. Satu diantara identitas yang paling sering digunakan dan akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu identitas agama, dalam hal ini Islam. Bila dikaitkan dengan Islam, maka Islam dapat dipandang sebagai salah satu bentuk yang khas dari sebuah identitas, ketika ia membumi dengan kehidupan manusia yang bermasyarakat dalam bentuk tradisi dan kebudayaan. Artinya penggunaan simbol-simbol islam sebagai strategi dalam berpolitik dapat dikatakan sebagai politik identitas, terlepas yang bersangkutan mengakui atau tidak.

Metodologi

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah untuk tujuan tertentu. Maksud cara ilmiah disini yaitu sebuah penelitian dilakukan mengikuti kaidah keilmuan yang bercirikan rasional, sistematis, dan empiris. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang tertentu yang bersifat logis.

Adapun jenis metode yang digunakan yaitu kualitatif. Alasan penggunaan metode ini, karena hendak menjelaskan dan mengidentifikasi, menguraikan atau mendeskripsikan terkait Islam dan politik identitas menjelang pilpres 2024 secara mendalam. Seperti diketahui, metode kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Sumber data dikelompokkan menjadi primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari buku, dan jurnal dan data sekundernya dari artikel yang dimuat di internet. Teknik Pengumpulan datanya dengan cara literatur review. Setelah itu data dikumpulkan, disajikan, lalu ditarik kesimpulannya.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Politik Identitas di Indonesia

Politik identitas dalam perjalanan Indonesia, sejatinya sesuatu yang telah ada sejak dulu. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah dari zaman Kolonial, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi. Pada masa Kolonial pembentuk semangat melawan penjajah adalah identitas, dalam hal ini Islam. Politik identitas Islam muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan dalam hal distribusi dan akses terhadap sumber daya, sehingga memunculkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. Tanpa adanya dorongan identitas, sulit membayangkan Indonesia terbebas dari penjajah, apalagi dalam situasi Indonesia yang ketika itu masih terbagi dalam berbagai wilayah kekuasaan. Walau begitu pada masa kolonial, praktik politik identitas juga dilakukan oleh penjajah. Misalnya kebijakan pendidikan yang berbasis identitas pada masa itu, dimana golongan Eropa mendapatkan perlakuan istimewa sebagai kelas pertama, mereka didirikan sekolah, kemudian golongan Cina sebagai warga kelas kedua diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah sendiri, sedangkan golongan pribumi sebagai warga kelas ketiga baru didirikan sekolah selang 80 tahun kemudian. Dalam perkembangan berikutnya, masa Orde Lama, politik identitas Islam bertransformasi dalam bentuk partai politik yaitu Masyumi. Salah satu tokohnya M. Natsir, dikenal sebagai pemersatu bangsa lewat mosi integral, dan pernah menjadi perdana menteri 1950-1951. Era Orde Baru identitas Islam dileburkan ke dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Era reformasi ditandai dengan kemunculan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai UMMAT yang terbaru.

Memang dalam perkembangannya politik identitas secara umum bisa dikatakan bermata dua, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Dampak positif politik identitas dapat memperkuat solidaritas dan persatuan atas kesamaan nasib dalam kelompok tertentu. Termasuk mengokohkan dan menumbuhkan sikap toleransi antar kelompok. Hal ini dapat dilihat pada masa-masa awal berdirinya Indonesia, dimana kesamaan identitas Islam dan Nasionalisme mampu menyingkirkan bangsa penjajah. Akan tetapi dampak negatif politik identitas dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa. Apalagi kalau para aktornya menggunakan retorika mengunggulkan kelompok sendiri, lalu merendahkan kelompok lain. Selain itu, politik identitas dapat memicu kecurigaan terhadap kelompok lain, sehingga menumbuhkan sikap diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok yang berbeda. Contoh gerakan politik identitas yang berdampak

perpecahan diantaranya RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Gerakan Darul Islam (DI) di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh adalah bagian dari gerakan politik identitas berbasis agama. Meskipun sebagian orang mengatakan penyebab kemunculan gerakan itu adalah karena adanya ketidakadilan yang disebabkan oleh diskriminasi distribusi sumber daya yang tidak merata oleh kekuasaan pusat. Ditambah tradisi pemerintahan Indonesia sebelum reformasi yang cenderung sentral alias terpusat. Proses pembangunan hanya terpusat di Jawa, sedangkan di luar itu kurang mendapatkan perhatian. Itu sebabnya, ide mengenai keadilan menurut Syafii Maarif menjadi sangat relevan.

Dalam perkembangan mutakhir pasca reformasi cakupan penggunaan politik identitas meluas, termasuk dalam hal pemekaran wilayah. Sayangnya di tingkat lokal alih-alih politik identitas digunakan untuk menumbuhkan solidaritas dan sikap toleransi yang terjadi politik identitas justru digunakan untuk menguatkan posisi elit lokal. Sedangkan politik identitas Islam yang paling fenomenal yaitu pada pilkada DKI Jakarta, yang ditandai kemunculan aliansi gerakan 212 yang secara tegas mendukung Anies-Sandi yang dianggap berpihak kepada umat Islam dan pribumi sebagai identitas utamanya dan dijadikan sebagai retorika politik yang terus digaungkan. Antitesa terhadap gubernur petahana yang dikenal dengan nama Ahok yang beretnis Tionghoa dan Kristen yang juga membangun konsolidasi melalui ikatan etnis dan agama untuk mendapatkan dukungan politik. Akan tetapi kemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa dikatakan sebagai bukti kemenangan politik identitas Islam.

Pada pilpres 2019 politik identitas kembali dimainkan oleh Prabowo-Sandi, dengan menggaet kelompok Islam yang menjadi aktor penting dalam pilkada DKI Jakarta yang telah berubah status menjadi alumni 212. Pada saat yang sama rival Prabowo yaitu Jokowi juga menggunakan politik identitas dengan menjadikan KH Ma'ruf Amin sebagai wapres, dengan alasan Ma'ruf adalah agamawan yang bijaksana. Menunjukkan betapa aspek agama, terutama Islam sebagai identitas seringkali menjadi kendaraan politik untuk mendulang dukungan masyarakat. Maruf Amin sendiri adalah tokoh NU, Kyai sekaligus ulama serta representasi dari kaum santri, yang keseluruhannya itu memainkan peran penting dalam penggunaan politik identitas oleh kubu Jokowi. Tujuannya jelas agar suara kaum santri dan NU dapat dikapitalisasi untuk memenangkan Jokowi-Maruf pada pemilihan presiden 2019. Terbukti hasil survey Pilpres 2019, menyebutkan 56 persen warga Nahdliyin mengaku memilih Jokowi-Ma'ruf, naik 12 persen dibandingkan pemilu tahun 2014.

Menunjukkan politik identitas mewarnai kontestasi pemilu tanah air, terlepas pelakunya mengakui atau tidak.

Farming Isu Politik identitas Islam Menjelang Pemilu 2024

Sayangnya sejauh ini umat Islam paling dirugikan ketika berbicara soal politik identitas. Seakan jika menyebut politik identitas, umat Islam akan disorot sebagai pelaku tunggalnya. Padahal fenomena ini bukan hanya terjadi di satu tempat saja, di daerah-daerah juga politik identitas dimainkan seperti yang terjadi dalam Pilkada NTT 2018. Akan tetapi farming politik identitas Islam menjelang pemilu 2024, selalu digembosi dengan label politisasi agama, kekerasan, pembangkangan, terorisme, intoleran serta label-label negatif lainnya. Label negatif ini mulai digaungkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, kemudian pada Pilpres 2019 hingga saat ini. Bahkan pilkada DKI 2017, disebut oleh media luar sebagai pertarungan politik antara kelompok Islam ekstrimis dan Ahok yang beretnis ganda (Kristen dan Cina). Hanya saja semakin kesini, farming isu politik identitas menjelang pemilu 2024, sesungguhnya mengarah pada dua tujuan utama yaitu untuk mendulang dukungan, dan menjatuhkan lawan politik termasuk merusak citra Islam.

Bagi kelompok yang pertama, retorika politik identitas dilihat sebagai bagian dari konsolidasi atas kesamaan nasib, yaitu fakta ketidakadilan dalam hal distribusi dan akses terhadap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dan penegakan hukum. Disini pentingnya keadilan. Sebab ketidakadilan merupakan awal kemunculan perpecahan, saling curiga antar kelompok masyarakat, serta keinginan untuk melawan kekuasaan yang dominan dan anti kritik serta sekelompok masyarakat serakah yang menguasai hampir seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara. Sementara identitas Islam terbukti menjadi satu-satunya wadah kekuatan yang dapat mengumpulkan orang-orang dari berbagai latar belakang yang memiliki kesamaan kepentingan. Hal inilah yang terjadi dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Kelompok pertama meyakini politisi dari partai apapun pasti akan menggunakan politik identitas Islam sebagai senjata untuk mendulang dukungan dalam pemilu 2024, terlepas mereka mengakui atau tidak. Dan memang realitanya dalam tradisi politik di Indonesia, menjelang pemilu banyak politisi berubah menjadi lebih islami, sering mengunjungi masjid-masjid, mendatangi berbagai pondok pesantren. Biasanya datang ke pondok pesantren berpakaian khas identitas budaya santri, berjubah, bersorban dan lain sebagainya. Disebut untuk silaturahmi meski langkah itu kerap terlihat setiap menjelang pemilu dan jadi strategi mendongkrak elektabilitas. Konkritnya meminta restu dan

dukungan kyai, santri sampai wali santri dan juga jamaah pesantren yang bersangkutan. Adapun partai politik yang tidak menolak politik identitas, selain partai UMMAT yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan.

Sedangkan bagi kelompok yang menggunakan isu politik identitas untuk menjegal lawan politik, membangun retorika politik identitas dikhawatirkan akan berdampak pada perpecahan atau polarisasi yang berujung pada konflik horizontal. Kekhawatiran itu diperkuat oleh narasi yang dikemukakan oleh berbagai pihak dari berbagai penjurur, mulai Presiden, Polri, tokoh ormas, partai politik sampai lembaga penyelenggara pemilu termasuk judul berita provokatif media. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) misalnya, melihat isu politik identitas perlu diwaspadai menjelang tahun politik 2024 dan menjadi kekhawatiran bersama, bukan hanya KPU. Singkatnya pelaku politik identitas bagi mereka berbahaya dan harus ditolak. Bagi kelompok kedua, politik identitas tidak datang dari ruang hampa, tentu ada pelakunya dan harus dikampanyekan di publik. Tujuannya untuk dihindari oleh masyarakat, dan jika pelakunya adalah pesaing mereka pada pemilu 2024 mendatang, semoga saja elektabilitasnya menurun setelah dihujani dengan isu politik identitas. Nampaknya metode ini yang dipakai oleh mereka untuk menjegal Anies Baswedan yang merupakan pemenang dalam pilkada DKI Jakarta 2017 yang disokong oleh umat Islam melalui gerakan 212. Anies diusung partai NasDem, PKS dan Demokrat untuk maju sebagai calon presiden 2024. Bagi kelompok kedua, Anies adalah representasi dari kelompok pendukung politik identitas Islam sebagaimana yang terjadi pada Pilkada 2017. Untuk itu harus ditolak dan diserang habis-habisan.

Diantara aktor partai politik yang sangat getol menyerang politik identitas terhadap Anies adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terus mengeritiknya ketika menjadi gubernur DKI sampai selesai. Bahkan pada pilpres mendatang PSI secara jelas dan tegas tidak mendukung Anies, karena dinilai terlibat dalam politik identitas pada pilkada DKI Jakarta 2017. PDI Perjuangan menganggap pelaku politik identitas tidak punya prestasi. Akan tetapi apakah kedua partai ini tidak pernah melakukan politik identitas? Sebelum pemilu 2019, PSI berkunjung ke sebuah pondok pesantren. Katanya dalam rangka mendengarkan aspirasi, tetapi sekaligus meminta dukungan dalam bentuk saran dan doa untuk Pemilu 2019. Kemudian calon Presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo, pasca dideklarasikan mengunjungi pondok pesantren bertemu kyai dan santri. Diantaranya di pondok pesantren Girikusumo di Kecamatan Mranggen, Demak, Kamis, 4 Mei 2023. Katanya dalam rangka meminta masukan untuk pendidikan di Jateng dan merawat

kebangsaan. Akan tetapi dalam pertemuan itu Ganjar mengatakan, banyaknya pondok pesantren legendaris di Jateng membawa keuntungan baginya. Presiden Jokowi menolak politik identitas terjadi dalam pemilu 2024, tetapi tidak menolak atau tidak berkomentar ketika Hary Tanoë pengusaha sukses beretnis Tionghoa sekaligus orang dekat Presiden yang menyatakan terkait pilpres 2024 warga Tionghoa menunggu arahan Presiden Jokowi.

Fakta diatas mengirim sinyal mengenai tidak konsistennya sikap kelompok yang menolak politik identitas ini. Ketika politik identitas dilakukan oleh kelompok yang berbeda dengan mereka dianggapnya berbahaya. Akan tetapi bila yang melakukannya kelompoknya sendiri maka tidak ada komentar atau penolakan. Ujungnya farming politik identitas hanya dijadikan sebagai momok untuk menjegal lawan politik, meskipun usaha ini terkesan dipaksakan. Padahal baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak, sama-sama melakukannya, dan itu sah-sah saja. Intinya politik identitas tidak bisa dihindarkan dalam setiap momentum pemilu. Konkritnya ada kelompok identitas yang ditarget oleh aktor politik tertentu, untuk dikapitalisasi suaranya, baik kelompok agama, etnis dan identitas lainnya baik yang satu identitas dengannya, maupun yang di luarnya, serta menampilkan diri layaknya kelompok yang ditargetkan. Pada titik ini, Gary Younge menyebutkan politik identitas adalah istilah yang berhubungan dengan segala jenis intervensi politik yang dengan sengaja menargetkan suatu kelompok dengan tujuan yang dirasakan untuk mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya menolak penggunaan politik identitas menjelang pemilu 2024, sama halnya menolak para politisi masuk ke pesantren, menampilkan diri mereka sebagai pribadi yang secara tiba-tiba menjadi religius dan berpihak kepada kepentingan umat Islam. Meskipun setelah terpilih suara umat Islam ditinggal dan tidak didengarkan lagi. Bahkan tidak jarang berubah menjadi oposisi paling radikal setiap kali ada upaya-upaya memasukkan kepentingan umat Islam dalam kebijakan pemerintah.

Islam memandang politik identitas sebagai sesuatu yang sangatlah mulia selama dijalankan untuk tujuan yang mulia pula. Dalam Islam, pemimpin haruslah yang seiman, dasarnya firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Telah dijelaskan juga dalam Qur'an bahwa

memimpin adalah fitrah, dasarnya firman Allah SWT, dimana Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sedangkan memilih pemimpin yang seiman adalah keharusan. Ulama salaf ketika memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan telah sampai pada tingkat bersepakat dan tidak ada perselisihan, meskipun ada legitimasi terhadap bolehnya memilih pemimpin diluar Islam, hal itu berdasarkan fatwa dari ulama muta'akhirin saat ini. Walau begitu, generasi salaf adalah sebaik-baik generasi utama dan terbaik, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW. Demikian pentingnya memilih pemimpin dalam Islam, mengingat posisi pemimpin itu strategis, menyangkut persoalan umat dan Bangsa. Sehingga kalau pemimpinnya benar-benar orang yang beriman dan bertaqwa, nilai-nilai Islam dan umat Islam dijalankan dan tidak tersingkir dari negerinya sendiri. Untuk itu penting bagi umat Islam memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang jelas identitas, terutama agamanya. Sebab terkadang ada orang yang tiba-tiba Islam saat musim pemilu, padahal aslinya dia bukan Islam, atau Islam tapi ketika pemilu saja, mereka itu adalah kelompok hipokrit.

Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024

Terlalu banyak narasi yang beredar, baik melalui wacana akademik maupun media yang beredar di ruang publik yang melihat politik identitas ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Pada saat yang sama tidak sedikit juga naskah akademik maupun wacana yang melihat politik identitas ini sebagai sesuatu yang alami. Terlalu banyak fakta yang menunjukkan bahwa, seorang memilih dalam pemilu karena pertimbangan identitas, atau seorang berafiliasi dengan partai tertentu karena kesamaan identitas, atau partai yang bersangkutan banyak berpihak kepada identitasnya terutama identitas agama. Intinya seperti dikatakan oleh Younge bahwa identitas selalu ada dalam politik. Menurutnya tak satupun dari kita datang ke politik dari ruang hampa, tapi kita datang dengan afiliasi yang membentuk pandangan dunia kita. Bagi umat Islam pandangan dunianya jelas Islam, begitu pula agama yang lain. Dalam konstelasi politik, tak jarang ia digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan politik. Tegasnya politik identitas Islam menjelang pemilu 2024 adalah sebuah keniscayaan, sedangkan pandangan negatif terhadapnya terlalu didramatisir. Padahal riilnya, politik identitas jamak dilakukan oleh politisi dari golongan manapun.

Kalaulah politik identitas itu diidentikkan dengan perpecahan, kekerasan, konflik, polarisasi dan sebagainya, sejauh ini akar dari semua itu adalah ketidakadilan. Tingkat kemiskinan yang belum terurai secara tuntas menjadi pembakar timbulnya perpecahan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen. Tentu, kelompok yang paling banyak adalah umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Sedangkan pada saat yang sama, kelompok oligarki tumbuh subur. Belum lagi soal penegakan hukum yang timpang. Terdapat sekelompok masyarakat yang sama sekali tidak tersentuh oleh hukum, yaitu mereka yang mendukung rezim, yang diwakili oleh buzzerRP, bahkan terkesan sengaja dipelihara. Mereka ini digunakan oleh rezim yang berkuasa tidak hanya untuk menyebarkan programnya, tapi juga untuk menangkal dan menyerang para pengkritik rezim. Para buzzerRP ini dimanfaatkan oleh negara untuk mengkampanyekan kebijakannya, terutama saat Covid19 melanda Indonesia. Untuk menghidupi mereka negara tidak tanggung-tanggung menghabiskan 90,45 miliar.

Sebaliknya, terdapat kelompok masyarakat yang harus berurusan dengan hukum, bahkan kalau bisa diburu jika berani mengkritik rezim, mereka itu kaum oposisi. Hak demokrasi mereka untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasinya ditolak dan dibubarkan. Misalnya saja aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap kelompok oposisi sebelum pemilu 2019, di mana sikap itu menjadi modal untuk medeletigimasi aksi protes pasca pemilu. Pasca pemilu ditandai dengan penangkapan terhadap aktivis yang kritis, terhadap rezim, termasuk pembubaran paksa terhadap pertemuan kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan. Akhirnya setelah persoalan keadilan, persoalan kebebasan berpendapat menjadi salah satu penyebab kemerosotan Indonesia. Data hasil survey menyebutkan indeks demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran sebagaimana yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Hasil survey dari V-Dem yang berpusat di Swedia seperti dikutip dalam laporan menyebutkan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Menanggapi itu, negara berdalih akibat pandemi Covid 19 (Koran Tempo 22 Mei 2023). Analisis dari Felix Nathaniel menyebutkan Jokowi tidak memandang demokrasi sebagai hal yang harus diperjuangkan. Baginya, demokrasi hanya alat untuk memenangkan pemilu. Kondisi ini diperparah oleh persoalan korupsi yang tidak pernah selesai. Lembaga transparansi internasional merilis hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk pengukuran tahun 2022 di Indonesia. Hasilnya indeks persepsi korupsi Indonesia

mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Dari 180 negara yang di survei, Indonesia bertengger di peringkat 110 atau sama dengan skor 34/100, dari 2021 yang berada pada skor 38/100 alias terjungkal 4 poin.

Situasi di atas meniscayakan kehadiran aliansi identitas tertentu untuk mengupayakan perubahan. Karena itu umat Islam sebagai sebuah entitas besar harus mengambil peran dalam pemilu 2024. Penggunaan politik identitas dalam bentuk dan dosis apa dan berapapun tidak akan membahayakan bangsa selama tidak dengan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi dan kohesi sosial termasuk keadaban dalam berbangsa. Akan tetapi kalau ada kelompok yang membangun retorika menolak politik identitas menjelang pemilu 2024 sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi dalam ruang demokrasi, meskipun tidak ada aktor politik yang luput dari menggunakan politik identitas, dalam bentuk apapun, baik agama, ras, budaya, gender dan sebagainya. Justru, kelompok yang menolak politik identitas itu perlu dipertanyakan, apakah benar mereka tidak akan menggunakan politik identitas. Ditengah gempuran fakta di berbagai negara yang menyebutkan pengaruh agama sebagai sebuah identitas dalam mengubah perilaku politik pemilih biasa terjadi. Hal ini didasarkan pada sejumlah temuan di berbagai negara seperti di Italia, Belgia, Kanada, Afrika Selatan dan Swiss. Adapun bagi kelompok yang mendukung politik identitas, itu adalah pilihan. Hanya yang perlu dicatat, penggunaan politik identitas jangan hanya bersifat temporal, dimana hanya untuk mengkapitalisasi dukungan umat Islam saja, setelah terpilih suara umat ditinggal dan tidak didengar.

Akan tetapi untuk meminimalisir akibat negatif dari politik identitas, kedepan perlu dirumuskan implementasi politik identitas ini agar tetap mendorong sikap toleransi antar kelompok yang berbeda. Disini peran akademisi, tokoh masyarakat, ormas arus utama dan pihak-pihak terkait sangat penting. Memberikan pencerahan kepada publik Indonesia mengenai penggunaan politik identitas menjelang pemilu 2024 agar tetap menjaga kerukunan bangsa. Sehingga meskipun masing-masing kelompok menonjolkan identitasnya dan menjadi pertimbangan dalam mempengaruhi preferensi politiknya, pada saat yang mereka juga berkewajiban untuk menjaga harmoni sosial bangsa Indonesia yang heterogen. Dengan begitu praktik politik identitas dapat dilihat sebagai proses kompetisi yang sportif antar identitas disatu sisi, tetapi membuka peluang untuk kolaborasi di sisi yang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa, politik identitas diartikan sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial, sebagai kategori utamanya, atau identitas sebagai strategi dan konstelasi ikatan simbol kultur, primordial (agama, suku, ras dan kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, (Agnes Heller dan Lasswell dalam Syafuan , dkk 2021). Adapun menurut Ahmad Syafii Maarif, secara substantif politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok yang merasa diperas dan tersingkir oleh sebuah arus besar dalam sebuah negara atau bangsa. Politik identitas mengemuka pada 1990-an tepatnya di Amerika Serikat, sebagai reaksi atau respon terhadap ketidakadilan berbasis identitas dan seksual. Sedangkan di Indonesia telah ada sejak masa kolonial.

Dalam perkembangannya, politik identitas di Indonesia cakupannya meluas sampai ke persoalan pemekaran wilayah. Sayangnya di tingkat lokal alih-alih berdampak positif, yang terjadi sebaliknya, mengokohkan posisi elit lokal. Memang penggunaan politik identitas bisa dikatakan bermata dua, bisa positif dan negatif. Solidaritas dan toleransi antar kelompok merupakan dampak positifnya, sedangkan kecurigaan, konflik, perpecahan merupakan dampak negatifnya. Sedangkan penggunaan isu politik identitas menjelang pemilu 2024 mengarah pada dua tujuan utama; mendulang dukungan, dan menjegal lawan politik. Walau faktanya, hampir tidak ada aktor politik yang tidak menunggangi politik identitas untuk kepentingan politik, hata yang menolak sekalipun. Meskipun banyak kajian yang melihat politik identitas sebagai sesuatu yang negatif, tidak sedikit juga yang menganggapnya positif. Atas dasar itulah penelitian ini menyimpulkan penggunaan politik identitas Islam dalam bentuk dan dosis apa dan berapapun tidak akan membahayakan bangsa selama tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi dan kohesi sosial termasuk keadaban dalam berbangsa.

Adapun kekhawatiran terhadap penggunaan politik identitas sejatinya terlalu di dramatisir. Penelitian ini juga berpendapat penggunaan farming isu politik identitas menjelang pemilu 2024, sesungguhnya mengarah pada dua tujuan utama yaitu untuk mendulang dukungan, dan menjatuhkan lawan politik termasuk merusak citra Islam. Sedangkan yang menyebabkan konflik dan perpecahan adalah ketidakadilan, dimana akses terhadap sumber daya baik ekonomi, dan hukum itu timpang. Untuk itu umat Islam harus terlibat aktif dalam politik, dan penggunaan politik identitas adalah mulia. Islam

mengajarkan hanya boleh memilih pemimpin yang seiman, sebagaimana telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan juga kesepakatan para ulama. Akan tetapi untuk meminimalisir akibat negatif dari politik identitas, kedepan perlu dirumuskan implementasi politik identitas ini agar tetap mendorong sikap toleransi antar kelompok yang berbeda. Disini peran akademisi, tokoh masyarakat, ormas arus utama dan pihak-pihak terkait sangat penting. Memberikan pencerahan kepada publik Indonesia mengenai penggunaan politik identitas menjelang pemilu 2024 agar tetap menjaga kerukunan bangsa.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- S.D. Alfidus, Dari. "Isu Identitas Pada Kontestasi Pilkada di NTT tahun 2018", *Jurnal Politiconesia*, Vol.1, No.1, 2022.
- Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme", *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, Vol.11, No.1, 2020.
- Elmadagli, Cansu dan Machin, David. "The Gains and Losses of Identity Politics: The Case of a Social Media Social Justice Movement Called Stylelikeu", *Critical Discourse Studies*, 2022.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Habibi, Muhammad. Analisis Politik Identitas di Indonesia, 2018. Diakses <https://www.researchgate.net/publication/315338050>.
- Kiftiyah, A. "Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia", *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol.3, No.01, 2019.
- MD. Abbiyyu, dan DA. Nindyaswari. "Penggunaan Buzzer dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo", *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional", *MAARIF*, Vol. 13, No. 2, 2018.
- Nursyahid, Muhammad. "Islam dan Identitas", *Karimiyah: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol.1 No.1, 2021.
- Prasetyo, Ari. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. Zifatama Jawara, 2014.
- Q.S. Al-Baqaroh [2]:30.
- Q.S. Al-Maidah [5]:51.
- Romli, Lili. Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 4, No. 1, 2019.

- Salim, Kamaruddin. Politik Identitas di Maluku Utara. *POLITIK*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- Saputro, A. Agama dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol.2, No. 2, 2018.
- Suryanegara, AM. *Api Sejarah*. PT. Grafindo Pratama, 2009.
- Syafii A. Maarif, dkk. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina, 2010.
- Syafuan, dkk. *Politik Identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*. Bumi Aksara, 2021.
- Ukhra, Aunil. *Isu Politik Identitas dan Dinasti Politik dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Younge, Gary. "The Politics of Identity: from Potential to Pitfalls, and Symbols to Substance", *Identitas Global Studies in Culture and Power*, Vol. 26 No. 1. 2019.

Website

- https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu003.pdf. Diakses pada 11 April 2023.
- <https://news.detik.com/pemilu/d-6566940/partai-ummat-kami-adalah-politik-identitas>. Diakses pada 11 April 2023.
- <https://www.nu.or.id/nasional/ketum-pbnu-imbau-warga-nu-untuk-menghindari-politik-identitas-m1jru>. Diakses pada 11 April 2023.
- <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/haedar-nashir-tidak-berpolitik-identitas-tapi-datangi-pesantren/>. Diakses pada 11 April 2023.
- <https://www.britannica.com/topic/identity-politics>. Diakses pada 11 April 2023.
- <https://kbbi.web.id/identitas>. Diakses pada 11 April 2023.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/partai-persatuan-pembangunan-meleburnya-partai-islam>. Diakses pada 14 April 2023.
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/10/ramai-ramai-mengejar-restu-kiai>. Diakses pada 14 April 2023.
- <https://www.liputan6.com/news/read/5242841/5-fakta-nasdem-pks-dan-demokrat-resmi-bentuk-koalisi-perubahan-usung-anies-baswedan-jadi-capres-di-pemilu-2024>. Diakses pada 15 April 2023.
- <https://nasional.tempo.co/read/1641864/psi-sebut-anies-baswedan-terlibat-politik-identitas-nasdem-semua-manusia-pasti-pernah-berbuat-salah>. Diakses pada 15 April 2023.
- <https://www.merdeka.com/politik/awali-solidarity-tour-psi-kunjungi-ponpes-darussalam-bandung-barat.html>. Diakses pada 15 April 2023.
- <https://www.bps.go.id/publication/download.html>. Diakses pada 15 April 2023.
- <https://tirto.id/di-bawah-jokowi-oligarki-kian-mencengkeram-demokrasi-makin-semu-f7XT>. Diakses pada 16 April 2023.
- <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/>. Diakses pada 16 April 2023.
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/338091/pemerintah-habiskan-rp9045-miliar-untuk-bayar-buzzer>. Diakses pada 16 April 2023.

<https://nasionaltempo.co/read/1520796/top-nasional-demokrasi-di-era-jokowi-dinilai-makin-turun-dan-asal-usul-kemenag>. Diakses pada 16 April 2023.

<https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2022/>. Diakses pada 16 April 2023.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/06/politik-identitas-isu-jelang-kontestasi-politik-2024>. Diakses pada 16 April 2023.

<https://habibiecenter.or.id/img/publication/>. Diakses pada 16 April 2023.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.